

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)

The Effect of Financial Statements Presentation, Financial Statements Accessibility and Regional Financial Accounting Systems to Transparency and Accountability Regional Financial Management

(Study of Jember Sub Department of Local Government)

Maria Magdalena Hesti Kurniawati
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: hestikurniawati48@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria pegawai akuntansi/penatausahaan keuangan memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Statistik deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Metode Analisis Linier Berganda terdiri dari Koefisien Determinasi (R^2), Uji F, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah, serta semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Dan Akuntabilitas.

Abstract

This research was intended to know and analyze the effect of financial statements presentation, financial statements accessibility and regional financial accounting systems to transparency and accountability regional financial management. The sampling method used in this research was purposive sampling with the criteria of accounting staff or financial administration has a working time more than a year. This research used primary data from the respondents' answers based on the questionnaire provided. The data analysis method used in this research was descriptive statistic, data quality test, classic assumption test, and multiple linear regression method consisting coefficient of determination (R^2), F test, and t test. The research result showed that financial statements presentation, financial statements accessibility and regional financial accounting systems gave a positive effect to transparency and accountability regional financial management. This caused the better financial statements presentation create the easier access to the financial statements, also the better regional financial accounting system application will create a better transparency and accountability regional financial management.

Key words: *financial statements presentation, accessibility, regional financial accounting systems, transparency and accountability*

Pendahuluan

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sekarang perhatian semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparan. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997 (Mahmudi, 2010).

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah serta, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010).

Dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang mengarahkan untuk mengimplementasikan *good governance* maka pemerintah daerah tidak dapat lagi menutup-nutupi kondisi keuangannya dari publik. Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kita semua menginginkan terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam *good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan, dan kemandirian.

Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keuangan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku *stakeholders* mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja (Mahmudi, 2010). Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi atau kebohongan dan bahkan hanya karangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya.

Namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal (Nurmuthmainnah, 2015). Dilihat dari hal penyajian laporan keuangan saja, masih banyak daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), *disclamer*, dan Tidak Wajar (TW). Dari sisi penyimpangan yang menyebabkan indikasi kerugian negara dan sampai ke ranah tindak pidana korupsi pun masih marak. Justru banyak kepala-kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya yang tersangkut kasus korupsi hingga lurah pun tersangkut kasus korupsi. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD belum memenuhi standar yang seharusnya dan laporan keuangan tersebut tidak berkualitas karena hanya sedikit yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan masih didominasi oleh opini tidak memberikan pendapat. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan-perbaikan terhadap struktur, prosedur dan sumberdaya dalam penyusunan laporan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan daerah yang harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah untuk mencapai *good governance*.

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab, jujur, dan adil.

Permasalahan lain yang timbul adalah aksesibilitas dari laporan keuangan yang tidak berjalan maksimal. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Namun pada kenyataannya, masih sedikit pemerintah daerah bahkan SKPD yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapat informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan seakan ditutup-tutupi dan dirahasiakan dari masyarakat dan hanya dijadikan konsumsi untuk kalangan tertentu. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada semester I Tahun 2011 dan semester I Tahun 2015, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selama 10 tahun terakhir mendapatkan beberapa opini yang berbeda-beda dari BPK. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendapat opini Tidak Wajar (TW) sebanyak empat kali berturut-turut dari tahun anggaran 2005 sampai tahun anggaran 2008. Pembentukan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan oleh BPK kepada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebanyak lima kali yaitu tahun anggaran 2009 sampai 2011 dan tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2014 serta hanya mendapat satu kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun anggaran 2012 (IHPS I Tahun 2011; IHPS I Tahun 2015).

Pembentukan opini BPK atas pelaporan keuangan selama 10 tahun terakhir untuk kabupaten selain Kabupaten Jember yang berada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso mendapat opini Tidak Wajar (TW) sebanyak satu kali, mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 5 kali dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 3 kali. Sedangkan pembentukan opini BPK atas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu satu kali mendapat opini *disclamer*, dua kali mendapat opini Tidak Wajar (TW), tiga kali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sebanyak tiga kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pembentukan opini BPK atas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yaitu mendapat dua kali opini Tidak Wajar (TW), tujuh kali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (IHPS I Tahun 2011; IHPS I Tahun 2015).

Berdasarkan pembentukan opini selama 10 tahun terakhir kepada empat kabupaten yang berada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan keuangan atas Pemerintah Daerah

Kabupaten Jember masih jauh dari kata baik bila dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Opini tersebut diberikan oleh BPK karena laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut secara umum meliputi pencatatan yang tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, serta pelayanan atas informasi keuangan yang kurang transparan (IHPS I Tahun 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Metode Penelitian

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Jember. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun pada SKPD di Kabupaten Jember. Kriteria dalam pemilihan sampel yaitu responden yang ikut terlibat dalam proses pengelolaan keuangan, memahami penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan, memahami penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan telah bekerja pada bidang tersebut minimal satu tahun.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data ini diperoleh dari survey responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan survey lapangan melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada pegawai bagian akuntansi / penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Jember.

Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3). Sedangkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan variabel dependen.

Definisi Operasional Variabel

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Statistik deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan pengujian hipotesis yang terdiri dari metode analisis linier berganda, koefisien determinasi, uji F, serta uji t. Sedangkan model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- X₁ : Penyajian Laporan Keuangan Daerah
- X₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
- X₃ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- a : Konstanta
- b₁ : koefisien regresi dari X₁
- b₂ : koefisien regresi dari X₂
- b₃ : koefisien regresi dari X₃
- e : kesalahan residual (error term)

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam ini n adalah jumlah sampel. Butir pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan jumlah sampel 119 orang dan signifikansi 5%, maka nilai r_{tabel} dapat diperoleh melalui tabel r product moment person yaitu 0,1801. Dari hasil olahan data, semua item-item pertanyaan dari keempat

variabel dalam penelitian dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* yaitu suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dari hasil olahan data, nilai *Cronbach's Alpha* untuk seluruh variabel yang digunakan adalah lebih besar dari 0,6 dan ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan reliabel atau handal.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik yaitu *one sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5%. Jika *probability asymp.sig(2tailed)* > 0,05 maka data mempunyai distribusi yang normal. Dari hasil olahan data, hasil pengujian normalitas dengan Uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *probability asymp. sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan terdistribusi normal.

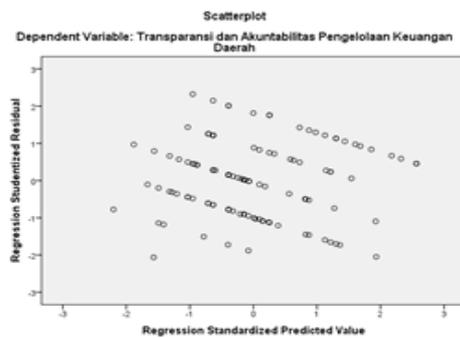
Uji Multikolonieritas

Dari hasil olahan data, tiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penyajian Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai VIF sebesar 1,112 dan nilai *tolerance* sebesar 0,889, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai VIF sebesar 1,076 dan nilai *tolerance* sebesar 0,930 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai VIF sebesar 1,191 dan nilai *tolerance* sebesar 0,839. Dalam penelitian ini ketiga variabel independen memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,1. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam pengujian dapat diketahui dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi (*sig*) < 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. Terjadinya heterokedastisitas dalam model regresi jika titik-titik dalam *scatterplot* membentuk pola-pola tertentu atau berkumpul di satu sisi atau dekat nilai 0 pada sumbu Y pada kurva yang dihasilkan saat kita menggambarkan kurva dengan SPSS.

Dari hasil olahan data, menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model ini yaitu Penyajian Laporan Keuangan memiliki nilai Sig sebesar 0,130, Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki nilai Sig sebesar 0,754, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai Sig sebesar 0,822. Ketiga variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai Sig > 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisis dari grafik *scatterplots* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang teratur, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Analisis Regresi Linier Berganda

Model estimasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah:

$$Y = 29,863 + 0,222X_1 + 0,183X_2 + 0,138X_3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dalam persamaan regresi tersebut adalah 29,863. Artinya, jika Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) bernilai 0, maka Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 29,863.
2. Nilai koefisien regresi variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,222. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah sebesar satu satuan, maka nilai variabel Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,222 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,183. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebesar satu satuan, maka nilai variabel Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,183 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,138. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar satu satuan, maka nilai variabel Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,138 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil olahan data uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,202. Hal ini berarti variabel dependen dipengaruhi oleh tiga variabel independen sebesar 20,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen

memengaruhi 20,2% variabel dependen sedangkan sisanya 79,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji F

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan ketentuan:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada α 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari uji ANOVA (*Analysis of Variance*) didapat nilai F_{hitung} sebesar 10,931 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,68. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,931 > 2,68$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uji t

Berdasarkan hasil olahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,009 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,010 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,012 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil uji t, variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,009. Artinya, variabel ini berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mengartikan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan daerah menunjang terciptanya transparansi dan akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima umum. Penyajian informasi yang transparan akan mewujudkan akuntabilitas publik karena penyajian informasi yang utuh dan transparan ini akan menggambarkan kinerja sesungguhnya dari suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari entitas kepada publik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) yang mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil uji t, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,010. Artinya, variabel ini berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mengartikan bahwa H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tergantung kepada aksesibilitas laporan keuangan daerah atau kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan tanpa memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan akan menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan maksimal. Semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah maka semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercipta.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hehanussa (2015) yang mengungkapkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif, pemerintah dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangannya guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil uji t, variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,012. Artinya, variabel ini berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mengartikan bahwa H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan, dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handri, Y.P dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dirancang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Penyajian laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum dapat mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik pula. Efektivitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tergantung aksesibilitas laporan keuangan daerah atau kemudahan akses

terhadap laporan keuangan daerah.. Pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangannya guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara baik dan menyusunnnya dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pertanyaan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner dari peneliti.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, pengaruh dari ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebesar 20,2%. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel tersebut belum cukup mewakili sebagai variabel yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti variabel Pengendalian Internal, variabel Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, dan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah.
3. Penggabungan variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai satu variabel dependen di dalam penelitian ini. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memisahkan variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah serta menggunakan salah satu variabel tersebut sebagai variabel dependen dalam penelitian. Karena setelah ditelaah lebih jauh kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda.

Daftar Pustaka

Aliyah, S. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas*

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.8 No.2, 97-186.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015)

Handri, Y.P., Rifa, D., dan Rahmawati, N. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Jurnal, Universitas Bung Hatta.

Hehanussa, Salomi J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Jurnal, UNISSULA.

Mahmudi, 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, edisi kedua*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Nurmuthmainnah, W. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi, Universitas Hasannudin.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wulandari, M.E. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi, Universitas Hasannudin.